

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
(LKPJ) - PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Rimbo Panjang - Salido Telp. (0756) 21080 Fax. (0756) 465208

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : EMIRDA ZISWATI, SE,MM
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. HENDRAJONI, S.H., M.H.
Jabatan : BUPATI PESISIR SELATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 27 Februari 2018

Pihak Kedua

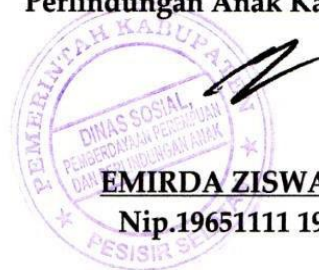
Pihak Pertama

Bupati Pesisir Selatan

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan

dto

H. HENDRAJONI, S.H., M.H.



EMIRDA ZISWATI, SE,MM

Nip.19651111 199003 2 006

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. URUSAN WAJIB

Gambaran Umum Bidang Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat, melalui redistribusi hasil-hasil pembangunan yang diwujudkan dalam kegiatan penanganan masalah-masalah sosial terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Meskipun telah dicatat banyak keberhasilan, namun beberapa masalah masih harus mendapat perhatian.

Tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial diantaranya memelihara, membimbing dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial, memupuk, dan meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab sosial masyarakat serta melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Usaha-usaha pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi bantuan sosial baik bagi perseorangan maupun kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban bencana, memelihara taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial, melakukan bimbingan, pembinaan, rehabilitasi sosial termasuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, serta melaksanakan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotongroyongan.

Pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat diperkirakan akan menghasilkan berbagai jangkauan pelayanan dan pemberdayaan sosial yang lebih luas bagi anak terlantar, termasuk di dalamnya anak jalanan dan anak cacat, serta pemberian santunan bagi lanjut usia terlantar, telah meningkatnya jumlah keluarga fakir miskin dan PMKS lainnya yang diberdayakan, sehingga mereka dapat hidup secara mandiri dan mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam hal kualitas perlindungan dan jaminan sosial, termasuk pengembangan sistemnya, diharapkan mampu menjangkau seluruh masyarakat termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi masih diwarnai dengan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan dan keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, keterpencilan, korban tindak kekerasan, akibat bencana alam dan bencana sosial, penyalahgunaan narkoba dan penyimpangan perilaku yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, permasalahan aktual yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial, kesenjangan sosial, perlu pula memperoleh perhatian dan penanganan yang serius.

Permasalahan-permasalahan ini perlu ditangani secara serius untuk menghindarkan kemiskinan struktural, perilaku anti sosial, kondisi disharmoni, kerawanan sosial dan tindak kejahatan yang akan menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial. Hal ini akan menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah bertekad untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dengan melaksanakan berbagai program/kegiatan bidang sosial dan meningkatkan koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kerjasama baik dengan pemerintah pusat, propinsi maupun Kabupaten/Kota.

B. Program dan Kegiatan.

Urusan ; SOSIAL

SKPD ; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATA	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	URUSAN SOSIAL			
	1. DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	498,436,336	489,039,001	98,03
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24,480,000	21,766,069	88,91
	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60,169,002	57,045,400	94,81
	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	143,670,624	143,502,210	99,88
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	17,895,569	17,882,000	99,92
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,721,142	21,184,926	97,53
	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,305,000	4,159,000	96,61
	7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Undang-Undangan	7,320,000	6,820,000	93,17
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	13,625,000	12,964,500	95,15
	9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	162,800,000	161,489,896	98,83
	10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	42,450,000	42,225,000	99,88
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	366,985,272	344,768,126	93,26
	1 Pengadaan Peralatan Gedung kantor	62,661,670	58,565,046	93,46
	2 Pengadaan Mobiller kantor	10,494,090	10,375,000	98,87
	3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	142,787,012	135,435,000	94,85
	4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	143,792,500	134,493,080	91,79

	5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	7,250,000	5,900,000	81,38
	3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	875,222,872	805,520,643	92,04
	1	Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	70,304,588	60,223,493	85,66
	2	Pelayanan Orang Terlantar di Perjalanan	62,842,004	44,922,300	71,48
	3	Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	201,811,546	196,812,750	97,52
	4	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	6,919,307	4,989,750	72,11
	5	Pendampingan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	55,724,898	53,805,950	96,56
	6	Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	477,620,528	444,766,400	93,12
	4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	309,289,502	293,878,270	95,07
	1	Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Perberasan (RASKIN)	73,770,835	64,084,250	87,07
	2	Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	235,518,667	229,794,020	97,57
	5	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	64,000,261	63,511,600	99,24
	1	Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat	64,000,261	63,511,600	99,24
	6	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	318,548,618	283,491,200	88,99
	1	Penyediaan Bahan Sembako Anak Panti	318,548,618	283,491,200	88,99
	7	Prog.Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	151,610,367	147,038,368	96,98
	1	Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan	151,610,367	147,038,368	96,98
	8	Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan	114,796,480	110,212,00022	96,01
	1	Sarasehan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan bagi Generasi Muda	34,185,088	31,673,100	92,65
	2	Pemeliharaan dan Perawatan Taman Makam Pahlawan dan MPN H.Ilyas Yacub	80,611,392	78,538,900	97,43

C. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 2.698.889.708,- terealisasi sebesar Rp. 2.537.459.208,- atau 94,01 %

Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Kegiatan Penyediaan Makan Minum, Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah.)**

Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan operasional administrasi perkantoran untuk memperlancar kegiatan dan pelayanan. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 498.436.336,- realisasi sebesar Rp. 489.039.001,- atau 98,03%

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Kegiatan Pengadaan Meubiler, Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor)**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dengan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana kantor agar kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaannya. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 366.985.272,- terealisasi sebesar Rp. 344.768.126,- (93,95%).

- 3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Kegiatan Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan**

Kegiatan ini bertujuan menyediakan kebutuhan operasional penyaluran bantuan dan jaminan sosial Program PKH di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan anggaran sebesar Rp. 70.304.588,- realisasi sebesar Rp. 60.223.493,- atau 85,66%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersalurkannya bantuan dan jaminan sosial Program PKH di Kabupaten Pesisir Selatan dan terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap bantuan Program PKH di Pesisir Selatan.

Dampak dari kegiatan ini adalah tercapainya penyaluran bantuan Program PKH yang tepat sasaran.

Kegiatan Pelayanan Orang Terlantar di Perjalanan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan biaya penanggulangan orang terlantar, mayat terlantar dan pembayaran premi asuransi ODGJ, dengan anggaran sebesar Rp. 62.842.004,-, realisasi sebesar Rp. 44.922.300,- atau 71,48%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tertanggulangnya orang terlantar, mayat terlantar dan ODGJ.

Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan terhadap orang terlantar, mayat terlantar dan ODGJ.

Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data PBI APBD

Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi dan validasi data penerima PBI APBD, dengan anggaran sebesar Rp. 6.919.307,- realisasi sebesar Rp. 4.989.750,- atau sebesar 72,11%. Hasil dari kegiatan ini adalah terverifikasinya data penerima PBI APBD.

Dampak dari kegiatan ini adalah tersedianya data penerima PBI APBD yang valid.

Kegiatan Pendampingan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin

Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan dan pendampingan bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin, dengan anggaran sebesar Rp. 55.724.898,- realisasi sebesar Rp. 53.805.950,- atau sebesar 96,56%. Hasil dari kegiatan ini adalah terbinanya penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin.

Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemanfaatan bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin.

Kegiatan Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan ini bertujuan untuk fasilitasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan, dengan anggaran sebesar Rp. 201.811.546,- realisasi sebesar 196.81.750,- atau sebesar 97,52%. Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya permasalahan fakir miskin. Dampak dari kegiatan ini adalah tercapainya bantuan yang tepat sasaran.

Kegiatan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu

Kegiatan ini bertujuan untuk verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu, dengan anggaran sebesar Rp. 477.620.528,- realisasi sebesar 444.766.400,- atau sebesar 93,12%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data BDT yang telah diverifikasi. Dampak dari kegiatan ini adalah tercapainya bantuan yang tepat sasaran.

4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap kejadian luar biasa berupa bencana alam dan bencana sosial serta penyediaan logistik bencana. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.235.518.667,- dan realisasi sebesar Rp. 229.794.020,- (97,57%).

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya biaya penanganan bencana alam dan bencana sosial dan pemberian bantuan berupa logistik. Dampak dari kegiatan ini adalah tercapainya penanganan tanggap darurat tentang kejadian luar biasa berupa bencana alam dan bencana sosial.

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Perberasan (Raskin)

Kegiatan ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi penyaluran beras sejahtera (rastra) di Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 73.770.835,- dan realisasi sebesar Rp. 64.234.250,- atau 87,07%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terselurkannya bantuan beras sejahtera tepat sasaran. Dampak dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan pangan keluarga miskin.

5. Program Pembinaan para Penyandang Cacat Trauma.

Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat.

Program ini bertujuan untuk pembinaan dan pendampingan para penerima jaminan sosial penyandang cacat berat di setiap kecamatan serta menyediakan uang transportasi dan akomodasi para pendamping dalam rangka pertemuan di kabupaten dengan anggaran sebesar Rp 64.000.261,- dan realisasi sebesar Rp. 63.511.600,- atau 99,24 %.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya keperluan penyandang cacat berat penerima jaminan sosial pusat. Dampak dari program ini adalah terbinanya para cacat berat penerima jaminan sosial pusat.

6. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.

Kegiatan Penyediaan Bahan Sembako Anak dalam Panti

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bahan sembako bagi anak panti sebanyak 8 panti dengan jumlah anak 80 orang selama 12 bulan serta biaya operasional lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 318.548.618,- realisasi sebesar Rp. 283.491.200,- atau 88,99%

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan sembako bagi anak dalam panti asuhan. Dampak kegiatan ini adalah terbinanya panti asuhan di Pesisir Selatan.

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia pengelola Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) dengan anggaran sebesar Rp. 151.610.367,- terealisasi sebesar Rp. 147.038.368,- atau sekitar 96,98 %

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya SDM pengelola LKKS dan terfasilitasinya operasional kegiatan LKKS Kabupaten Pesisir Selatan. Dampak dari Program ini adalah meningkatnya kualitas kelembagaan koordinasi kesejahteraan sosial di Pesisir Selatan.

8. Program Penanaman Nilai – Nilai Kepahlawanan bagi Generasi Muda

Kegiatan Sarasehan Penanaman Nilai Nilai Kepahlawanan bagi Generasi Muda

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan generasi muda terhadap sejarah perjuangan dalam merebut kemerdekaan, serta menghormati dan menghargai para pahlawan kita baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup dengan anggaran sebesar Rp. 34.185.088,- realisasi sebesar Rp. 31.673.100,- atau sekitar 92,65 %

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan generasi muda tentang nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan melalui sarasehan.

Dampak program ini adalah terciptanya generasi yang menghargai nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan

Program ini bertujuan untuk pemeliharaan Taman Makam Pahlawan yang berlokasi di Nagari Sago Kecamatan IV Jurai dan Makam Pahlawan Nasional yang berlokasi di Kecamatan Bayang dengan anggaran sebesar Rp. 80.611.392,- realisasi sebesar Rp. 78.538.900,- atau 97,43 %

Hasilnya adalah terpeliharanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Ilyas Yacub. Dampaknya adalah terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan melalui pemeliharaan makam pahlawan.

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.

Permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah keterlambatan dalam pelaksanaannya sehingga tidak sesuai dengan pelaksanaan yang telah direncanakan, permasalahan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tidak semua kelompok masyarakat yang dapat dilayani mengingat keterbatasan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Kabupaten Pesisir Selatan termasuk salah satu daerah rawan bencana di Sumatera Barat yang hampir setiap tahun mengalami bencana, maka perlu persiapan bantuan kepada korban bencana dan diperlukan perhatian dan penanganannya secara khusus.

Solusi atau tindakan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Memperluas jangkauan pelayanan peningkatan kemampuan keterampilan bagi masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri
- b. Meningkatkan potensi dan partisipasi PSKS.
- c. Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- d. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan pasca bencana.

1. URUSAN WAJIB

A. Gambaran Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkaitan dengan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini coba

diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penyusunan Dokumen Anggaran Responsif Gender dan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak.

B. Program dan Kegiatan.

Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SKPD ; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
14	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	105.039.028	91.428.500	87,04
	1. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	73.514.022	60.803.500	82,71
	2. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	31.525.006	30.625.000	97,15
	2. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN/ NAGARI	226.245.718	217.555.350	96,16
	1 Pemberdayaan Kelembagaan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten	75.000.000	70.085.900	93,45
	2 Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Persatuan Kabupaten	83.534.795	81.416.200	97,46
	3 Pemberdayaan Kelembagaan Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten	67.710.923	66.053.250	97,55
	2 PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	71.779.492	62.241.301	86,71
	1 Pembinaan Nagari Layak Anak	71.779.492	62.241.301	86,71
	3 Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah	178.722.744	163.064.617	91,24
	1 Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak.	83.297.928	77.923.367	93,55
	2 Penyusunan Anggaran Responsif Gender	26.309.867	23.220.280	88,26
	3 Pengembangan Fasilitasi Forum Anak Daerah	69.114.949	61.920.970	89,59

C. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi P2TP2A sebagai lembaga yang berfungsi melakukan advokasi dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 73.514.022,- realisasi sebesar Rp. 60.803.500,- atau 82,71%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Pesisir Selatan. Dampak dari kegiatan ini adalah menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan profil gender dan anak Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 31.525.006,-, realisasi sebesar Rp. 30.625.000,- atau 97,15%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya buku profil gender dan anak. Dampak dari kegiatan ini adalah mendukung pengimplementasian pengarusutamaan gender melalui ketersediaan data terpilah gender dan anak Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/ Nagari

Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten, Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Dharmawanita Persatuan Kabupaten dan Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten

Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelembagaan GOW, Dharmawanita Persatuan dan BKMT. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam kelembagaan Gabungan Organisasi Wanita, Dharmawanita Persatuan dan Badan Kontak Majelis Taklim. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 226.245.718,- realisasi sebesar Rp. 217.555.350,- atau 96,16 %

Hasil dari program ini adalah meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam organisasi kewanitaan GOW, DWP dan BKMT.

Dampak program ini adalah meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui fasilitasi kelembagaan perempuan.

3. Program Perlindungan Anak

Kegiatan Pembinaan Nagari Sayang Anak.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan dan Fasilitasi Nagari Layak Anak menuju Kabupaten Layak Anak. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 71.779.492,- realisasi sebesar Rp. 62.241.301,- atau sekitar 86,71%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya hak anak melalui pembinaan Nagari Layak Anak. Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dan tercapainya prediket Kabupaten Layak Anak.

4. Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak.

Kegiatan ini bertujuan untuk implementasi pengarusutamaan gender dalam pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 83.297.928,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.923.367,- Hasil dari kegiatan ini adalah terbinanya kelembagaan PUG pada setiap perangkat daerah. Dampak kegiatan ini adalah tercapainya pengarusutamaan gender pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Kegiatan ini bertujuan untuk implementasi pengarusutamaan gender dalam pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya dalam penganggaran responsif gender. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 26.309.867,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.220.280,-. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Anggaran Responsif Gender dalam bentuk dokumen GAB dan GBS pada anggaran perangkat daerah. Dampak kegiatan ini adalah tercapainya pengarusutamaan gender pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan Pengembangan Fasilitas Forum Anak Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pemenuhan hak anak dalam fasilitas kelembagaan Forum Anak Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 69.114.949,- dengan realisasi Rp.61.920.970,- atau 89,59%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dampak dari kegiatan ini adalah terpenuhinya hak anak dalam kelembagaan Forum Anak Daerah.

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program diatas adalah kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang isu Pengarusutamaan Gender dan Penganggaran Resposif Gender pada masing-masing Perangkat Daerah sehingga tujuan program ini belum maksimal dicapai.

Sedangkan solusi yang diperlukan adalah perlunya komitmen pimpinan untuk implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, sehingga kesetaraan dan keadilan gender dapat dicapai.

Painan, 13 Februari 2019

**Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan**



EMIRDA ZISWATI, SE,MM

Nip.19651111 199003 2 006